

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada Pemerintahan akuntabilitas itu kan sebuah hal penting pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama sejak diterapkannya otonomi daerah. Pemerintah daerah bukan cuma bertugas menjalankan program, tetapi juga harus bertanggung jawab atas hasil yang dicapai berbagai program pembangunan, tetapi juga wajib mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan, penggunaan anggaran, serta hasil kinerja yang dicapai kepada masyarakat sebagai pihak yang memberikan amanah. Tuntutan tersebut muncul seiring meningkatnya harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang mampu bekerja secara transparan, efektif, efisien, serta bertanggung jawab. Maka demikian, akuntabilitas kinerja itu jadi sebuah ukuran yang diperlukan dalam menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas merupakan hal yang perlu dilakukan pihak yang menerima tanggung jawab untuk sumber daya dikelola.

Akuntabilitas kinerja juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan prinsip *good governance* (Sedarmayanti, 2018). Dalam pelaksanaannya, pemerintah dituntut untuk menjalankan setiap kegiatan secara terbuka, mematuhi peraturan hukum, memberikan layanan publik yang unggul, serta menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan kepada masyarakat. Tingkat akuntabilitas yang tinggi akan memperkuat kepercayaan masyarakat karena setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dapat

dijelaskan secara transparan. Sebaliknya, apabila akuntabilitas belum terlaksana dengan baik, berbagai permasalahan dapat muncul, seperti pemborosan anggaran, ketidakefektifan pelaksanaan program, lemahnya pengawasan, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Akuntabilitas kinerja dapat digunakan sebagai sarana evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menilai keberhasilan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), selain untuk pertanggungjawaban. Masing-masing OPD memiliki target, program, dan hal yang perlu dilakukan harus diwujudkan untuk waktu tertentu sehingga diperlukan Metrik kinerja yang terukur dan tidak ambigu. Melalui sistem akuntabilitas yang baik, pemerintah dapat mengidentifikasi keberhasilan maupun kekurangan menerapkan program tersebut secara imparial sehingga temuan evaluasi dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja pada periode waktu berikutnya (Mahsun, 2019).

Penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah bukan cuman didasarkan keberhasilan pembangunan fisik, namun dipengaruhi oleh mutu pelayanan publik, efektivitas pelayanan administrasi, ketepatan pengelolaan anggaran, serta kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di daerah. Pemerintah daerah yang mampu menerapkan akuntabilitas secara optimal umumnya lebih mudah menyusun program kerja yang terencana, memanfaatkan anggaran secara efisien, serta menyajikan laporan pertanggungjawaban yang transparan. Sebaliknya, rendahnya tingkat akuntabilitas dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan, meningkatkan risiko

penyimpangan anggaran, dan menurunkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Penerapan akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah hingga saat ini masih menghadapi berbagai kendala. Dari pemeriksaan BPK RI, masih dijumpa sejumlah kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan tersebut meliputi penggunaan anggaran yang bukan sama dengan aturan, adanya kelebihan pembayaran pada beberapa kegiatan, lemahnya sistem pengendalian internal, dan masih ditemukannya pelanggaran kepada aturan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah masih perlu terus dilakukan guna meningkatkan seperti apa keakuntabilitan di pemerintah daerah (*BPK RI, 2024*).

Proses pelaksanaan SAKIP di lingkungan pemerintahan pada berbagai pemerintahan daerah secara rutin dinilai oleh Kementerian Administrasi dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa banyak pemerintahan daerah masih memperoleh peringkat sedang hingga rendah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa proses perencanaan kinerja, pengukuran capaian program, pelaksanaan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja belum berjalan secara optimal di beberapa daerah (*KemenPAN-RB, 2023*).

Perolehan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK bukan dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Opini tersebut lebih menitikberatkan pada kewajaran penyajian laporan keuangan menurut SAP. Namun dari pada itu, akuntabilitas kinerja memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu kemampuan pemerintah dalam mencapai sasaran

program, memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, serta mengelola anggaran dengan efektif, efisien, serta bertanggung jawab. Makanya, pemerintah daerah butuh meningkatkan kualitas kinerja organisasi secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada pencapaian opini WTP (*BPK RI, 2024*).

Permasalahan yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja juga masih ditemukan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Dari Laporan Audit Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK) Republik Indonesia tahun 2024 mengenai pelaksanaan APBD 2023, terdapat sejumlah temuan yang menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Beberapa di antaranya berupa kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebesar Rp586.551.528,00 dan penggantian biaya perjalanan dinas tambahan yang berjumlah total Rp129.944.200,00 pada beberapa kegiatan. Dari pada itu, BPK juga mendapatkan adanya kekurangan dalam proses penyusunan anggaran serta pelaksanaan sistem pengendalian internal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola keuangan daerah masih menjadi kebutuhan penting untuk menambah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (*BPK RI, 2024*).

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur harus menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan kewenangannya untuk mengatur dan mengawasi urusan pemerintahan sendiri. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai peranan pada pelaksanaan pelayanan publik, pembangunan daerah, serta administrasi pemerintahan. Banyaknya OPD yang terlibat menuntut adanya koordinasi yang baik, pengelolaan anggaran yang tepat, serta pertanggungjawaban

kinerja yang jelas. Jika tugas dan fungsi setiap poliklinik tidak dilaksanakan pada tingkat optimal, maka pencapaian tujuan pembangunan daerah berpotensi mengalami hambatan.

Tingkat akuntabilitas kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa terjadi oleh berbagai elemen, dari lingkungan internal dan eksternal bisnis. Pertimbangan internal mencakup kemampuan perangkat tersebut untuk mengelola sumber daya, mengerjakan program kerja, dan menyusun laporan pertanggungjawaban. Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan regulasi yang berlaku, mekanisme pengawasan, dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk penelitian ini, faktor yang ingin dikaji menjadi variabel yang memengaruhi akuntabilitas kinerja meliputi SAP yang diterapkan, mutu laporan keuangan, serta kompetensi sumber daya manusia (Mahsun, 2019).

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah apabila diterapkan dengan benar dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. SAP ini sendiri jadi panduan buat pemerintah saat membuat dan menyampaikan laporan dari keuangan, dan dasarnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Jadi tujuannya itu supaya laporan keuangan jadi lebih seragam, sehingga informasi yang dihasilkan bisa relevan, bisa dipercaya, mudah dibandingkan, dan juga gampang dipahami oleh siapa pun yang menggunakannya. Kalau SAP diterapkan dengan benar, pemerintah daerah jadi lebih gampang membuat laporan dari keuangan yang sama kayak aturan (PP Nomor 71 tahun 2010).

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) secara konsisten meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih tertata. Soalnya, laporan keuangan yang mengacu pada standar ini bisa ngasih gambaran yang lebih jelas tentang realisasi anggaran, aset, utang, pendapatan, sampai pengeluaran daerah. Informasi tersebut menjadi dasar bagi kepala daerah, DPRD, aparat pengawas, maupun masyarakat untuk mengerjakan penilaian terhadap apa yang dikerjakan (Halim & Kusufi, 2018a). Makanya, penerapan SAP berperan penting dalam memperkuat sistem pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Penerapan SAP yang belum optimal berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesalahan pencatatan transaksi, ketidaktepatan klasifikasi akun, keterlambatan penyusunan laporan keuangan, serta menurunnya kualitas informasi yang disajikan. Kondisi tersebut dapat menghambat proses evaluasi kinerja organisasi sekaligus mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. ari kondisi itu, bisa diduga kalau penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memang punya pengaruh dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Donaldson & Davis, 1991).

Instalasi SAP, bersamaan dengan keakuratan laporan keuangan, merupakan faktor sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah. Laporan keuangan adalah salah satu jenis pertanggungjawaban pemerintah daerah yang menunjukkan bagaimana pengelolaan keuangan dilakukan selama periode anggaran. sebagai manfaat terbaik, sebuah laporan keuangan harus sesuai dengan kualitas yang diuraikan dalam SAP: relevansi,

keandalan, perbandingan begitu juga mudah dipahami. Keuangan yang dilapor bagus akan memberikan gambaran objektif tentang situasi keuangan daerah sekaligus membuktikan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah (PP Nomor 71 Tahun 2010).

kualitas itu penting banget, karena jadi dasar utama dalam bikin keputusan. Kepala daerah membutuhkan informasi keuangan sebagai bahan penyusunan kebijakan pada periode berikutnya, DPRD memanfaatkannya untuk menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan masyarakat menggunakannya sebagai sarana Untuk mengevaluasi transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Maka demikian, laporan yang dibuat dengan bagus akan mempermudah proses evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah secara lebih objektif dan terukur (Defitri, 2016).

Laporan keuangan berkualitas tinggi juga membantu memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah. Kalau aparatur punya kemampuan yang cukup, mereka bakal lebih paham aturan, lebih terampil ngatur anggaran, nyusun laporan keuangan, dan menjalankan program kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, kalau pengetahuan dan keterampilan pegawainya masih terbatas, risiko salah administrasi atau kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah bisa jadi lebih besar. Karena itu, peningkatan kualitas SDM memang harus jadi fokus utama supaya tata kelola pemerintahan bisa berjalan dengan baik (Sundari et al., 2023).

Kompetensi sumber daya manusia bukan cuman dinilai dari tingkat pendidikan formal, namun mencakup pengalaman kerja, kemampuan teknis,

pemahaman terhadap peraturan, kemauan untuk terus mengembangkan diri melalui pendidikan dan pelatihan. Aparatur yang punya kemampuan yang baik biasanya juga lebih gampang beradaptasi dengan berbagai perubahan dan tuntutan pekerjaan yang ada dengan perkembangan regulasi maupun perubahan sistem pengelolaan keuangan pemerintah. Hasilnya, setiap pekerjaan dan kewajiban dapat diselesaikan secara profesional, efektif, dan bertanggung jawab (Wibowo, 2022).

Aparatur yang kompeten dalam lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengelola keuangan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku secara rapi dan tertib. Hasil yang baik dapat dicapai oleh staf yang memahami Standar Akuntansi Pemerintah dan prosedur penyusunan laporan keuangan. Kondisi tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sekaligus memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Noormansyah & Arkeda Sirkomba, 2022).

Beberapa dari penelitian sebelumnya juga mendukung kalau penerapan SAP, kualitas laporan keuangan, begitu juga SDM sama-sama punya mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian Noormansyah & Arkeda Sirkomba (2022) membuktikan bahwa penerapan SAP serta keefektifan administrasi pemerintahan sangat dipengaruhi melalui kualitas Kualitas pelaporan keuangan dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) setara dengan keahlian sumber daya manusia. Penelitian Sundari et al. (2023) juga menemukan hal itu menunjukkan kalau kualitas laporan keuangan ada dampak yang cukup besar buat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Gerry Hamdani Putra et al. (2024) yang mengungkapkan bahwa implementasi SAP dan Secara keseluruhan, kualitas laporan keuangan ikut memberi kontribusi yang positif dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan perbedaan hasil terkait faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas kinerja berdasarkan lokasi penelitian, kondisi organisasi, dan karakteristik tiap daerah. Dengan demikian, penelitian mengenai dampak dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, pengaruh kualitas laporan keuangan dan kemampuan sumber daya manusia terhadap akuntabilitas kinerja masih menjadi hal yang perlu diteliti lebih lanjut, khususnya di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas kinerja, sekaligus jadi bahan pertimbangan untuk menambah kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Ketersediaan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan dedikasi pejabat mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui penerapan konsep tata kelola pemerintahan yang baik. Kemampuan untuk memberikan layanan publik berkualitas tinggi, turut sama hukum dan aturan, serta penggunaan anggaran yang efektif dan efisien merupakan contoh dari komitmen ini. Apabila prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, maka rasa percaya publik sama pemerintah akan tambah dan administrasi pemerintahan yang lebih efektif akan dimungkinkan.

Penerapan *good governance* juga menuntut adanya transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah perlu bisa menyajikan informasi yang transparan dan gampang diakses oleh masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Keterbukaan informasi tersebut menjadi salah satu bentuk pengawasan publik terhadap pelaksanaan program pemerintah sehingga mampu meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.

Pemerintah daerah memerlukan sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi dengan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta evaluasi program untuk mewujudkan akuntabilitas yang optimal. Integrasi tersebut memungkinkan setiap kegiatan dapat dipantau secara berkesinambungan sehingga apabila ditemukan hambatan atau penyimpangan dapat segera dilakukan tindakan perbaikan. Dengan begitu, setiap penggunaan anggaran bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tetap sejalan dengan tujuan pembangunan daerah.

Kabupaten Aceh Timur meningkatkan standar tata kelola dan pengelolaan keuangan daerah secara lebih baik dan terorganisir sebagai daerah independen. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mampu mendukung pengembangan kemampuan SDM dan menyediakan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah, serta menjalankan program kerja secara efektif supaya target pembangunan daerah bisa tercapai. Diharapkan upaya ini akan menghasilkan administrasi yang lebih transparan dan profesional yang memprioritaskan pelayanan publik.

Temuan penelitian terdahulu memberikan bukti bahwa penerapan GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah, kualitas pelaporan keuangan, dan kemampuan sumber daya manusia berdasarkan fenomena yang telah diuraikan. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah akan mempertimbangkan penelitian ini ketika mengembangkan peraturan yang dapat meningkatkan standar manajemen keuangan dan memperkuat akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Akuntabilitas kinerja jadi salah satu indikator penting untuk melihat seberapa berhasil penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tingkat akuntabilitas yang baik mencerminkan kemampuan instansi pemerintah waktu sumber daya dikelola, melaksanakan program sesuai sasaran, serta mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaannya kepada masyarakat. Maka dari itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, memperbaiki sistem administrasi, serta mengoptimalkan kinerja aparatur agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara maksimal.

Peningkatan akuntabilitas kinerja tidak dapat diwujudkan hanya melalui kepatuhan terhadap ketentuan administrasi. Pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan suatu instansi tidak hanya diukur berdasarkan tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari pencapaian target kinerja, kualitas pelayanan publik, serta dampak yang dihasilkan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel memerlukan dukungan sistem pelaporan keuangan yang bisa memberikan informasi lengkap, akurat, dan juga tepat waktu. Informasi tersebut menjadi dasar bagi pimpinan dalam mengevaluasi pelaksanaan program, menetapkan kebijakan, serta menyusun strategi untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Di sisi lain, masyarakat juga dapat memanfaatkan informasi tersebut sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan tugas pemerintah daerah.

Kualitas SDM memiliki pengaruh dalam mendukung terciptanya akuntabilitas kinerja selain didukung oleh sistem pelaporan yang memadai. Aparatur dengan kompetensi yang memadai akan bisa memahami peraturan, mengoperasikan sistem pengelolaan keuangan, menyusun laporan sesuai standar, serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul selama pelaksanaan program. Sebaliknya, keterbatasan kompetensi dapat menghambat proses administrasi, menurunkan kualitas laporan keuangan, dan berpotensi memengaruhi tingkat akuntabilitas instansi pemerintah.

Penjelasan ini memperjelas bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, kualitas laporan keuangan, dan kemampuan sumber daya manusia itu tiga faktor yang saling berhubungan dalam mendukung meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ketiganya sama-sama berperan dalam membangun manajemen pemerintahan transparan, efektif, efisien, dan bisa menjadi layanan kepada masyarakat yang bagus ke masyarakat.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Aceh Timur dengan faktor-faktor seperti kompetensi sumber daya manusia, kualitas laporan keuangan, dan sejauh mana Standar Akuntansi Pemerintah diterapkan. Studi ini didasarkan pada sejumlah fenomena, teori terkini, dan temuan penelitian sebelumnya. Pemerintah daerah diharapkan dapat menggunakan temuan studi ini sebagai bahan evaluasi dan saran untuk meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja dan manajemen anggaran PHK (Donaldson & Davis, 1991).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Aceh Timur?
2. Adakah Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada OPD Kabupaten Aceh Timur?
3. Adakah Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada OPD Kabupaten Aceh Timur?
4. Apakah Penerapan SAP, Kualitas Laporan Keuangan, dan Kompetensi SDM secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada OPD Kabupaten Aceh Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada OPD Kabupaten Aceh Timur.
2. Mengetahui pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada OPD Kabupaten Aceh Timur.
3. Mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada OPD Kabupaten Aceh Timur.
4. Mengetahui pengaruh penerapan SAP, kualitas laporan keuangan, dan kompetensi SDM secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada OPD Kabupaten Aceh Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori-teori terkait penerapan SAP, kualitas laporan keuangan, kompetensi SDM, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang akuntansi sektor publik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui

efektivitas penerapan SAP, peningkatan kualitas laporan keuangan, dan pengembangan kompetensi aparatur.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pelatihan, supervisi, dan penguatan sistem pengendalian internal guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.